

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KAKAO MELALUI PRIMATANI : KASUS KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Iqbal¹ dan Azmi Dalimi²

¹ Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jalan A. Yani No. 70, Bogor 16161

² Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
Jalan Tentara Pelajar10, Bogor 16114

PENDAHULUAN

Kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan penting yang secara historis pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1560, namun baru menjadi komoditas penting sejak tahun 1951. Kemudian pemerintah mulai menaruh perhatian dan mendukung industri kakao pada tahun 1975, yaitu setelah PTP VI berhasil meningkatkan produksi tanaman ini melalui penggunaan bibit unggul *Upper Amazon Interclonal Hybrid* (Sunanto, 1992).

Tanaman kakao khususnya yang dikelola oleh petani (perkebunan rakyat) dapat dijumpai pada semua provinsi di Indonesia. Statistik Perkebunan (Dirjenbun, 2004) menunjukkan bahwa total areal perkebunan kakao rakyat di Indonesia tercatat seluas 801.332 hektar dengan total produksi 512.251 ton per tahun (produktivitas 963,33 kg/ha/tahun) dan jumlah petani sebanyak 910.835 kepala keluarga (rata-rata pemilikan lahan sekitar 0,89 ha/KK).

Wilayah sentra utama produksi kakao terdapat di kawasan Indonesia bagian Timur, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Dari ketiga provinsi tersebut, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi terbesar dibandingkan kedua provinsi lainnya. Total areal perkebunan kakao rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sekitar 296.039 hektar dengan total produksi 282.692 ton per tahun, produktivitas 953,60 kilogram per hektar per tahun, jumlah petani sebanyak 284.029 kepala keluarga, dan rata-rata pemilikan lahan sekitar 1,04 hektar per kepala keluarga (BPS Sulsel, 2004).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, kakao merupakan komoditas unggulan utama dan paling menonjol dibandingkan jenis tanaman perkebunan lainnya. Adapun kabupaten sentra produksi kakao meliputi Luwu Utara, Mamuju, Bone, Polmas, Luwu, dan Pinrang. Khusus untuk Kabupaten Luwu, luas arealnya tercatat 24.591,3 hektar, produksi 24.458,6 ton per hektar per tahun, produktivitas 994,6 kilogram per hektar per tahun, jumlah petani 19.423 kepala keluarga, dan rata-rata pemilikan sekitar 1,27 hektar per kepala keluarga (BPS Luwu, 2004).

Kendati tergolong sebagai komoditas unggulan, secara garis besar usahatani kakao rakyat ini masih memiliki beberapa kekurangan dan perlu

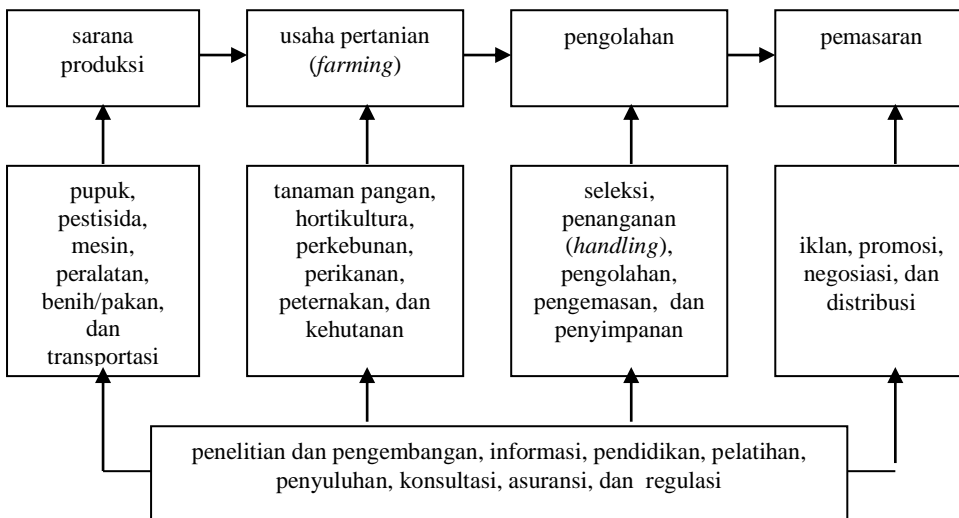
ditingkatkan. Kekurangan tersebut terkait dengan berbagai aspek, mulai dari budidaya pemeliharaan, panen/pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran. Namun dengan potensi yang dimiliki, usahatani ini berpeluang untuk dibenahi baik secara teknis maupun dalam hal penataan kelembagaannya. Salah satu peluang guna merealisasikan tujuan tersebut adalah melalui implementasi Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaryakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani).

Secara umum tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan agribisnis kakao melalui kegiatan Primatani. Tujuan spesifiknya adalah mengidentifikasi potensi dan kendala pengembangan agribisnis kakao, merekomendasikan langkah operasional kebijakan pengembangan agribisnis kakao melalui kegiatan Primatani.

PENDEKATAN DAN ANALISIS

Pendekatan

Salah satu pendekatan dalam pembangunan pertanian adalah melalui kegiatan agribisnis yang berorientasi pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha ekonomi rakyat yang berkelanjutan serta dilaksanakan dalam kerangka otonomi untuk memperkuat perekonomian daerah. Secara umum sistem agribisnis mencakup subsistem mulai dari pemasok sarana produksi, usaha pertanian (*farming*), pengolahan, hingga pemasaran (Baga, 2003). Untuk menunjang eksistensi subsistem agribisnis, diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan, informasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, konsultasi, asuransi, dan regulasi (Gambar 1).



Gambar 1. Sistem Agribisnis di Indonesia (Baga, 2003)

Dalam upaya memacu pengembangan sistem agribisnis, inovasi teknologi mutlak diperlukan. Untuk itu ada dua rancang bangun atau desain model inovasi, yaitu : (1) model introduksi; dan (2) model renovasi (Badan Litbang Pertanian, 2004a). Model introduksi adalah rancangan agribisnis teknologi berikut subsistem pendukungnya. Model introduksi ini mengakomodasi inovasi teknologi yang memerlukan rancangan model agribisnis yang baru pula. Sementara itu, model renovasi merupakan penyempurnaan dari model agribisnis yang ada, sehingga mencerminkan suatu revitalisasi inovasi. Prinsip dasarnya adalah bersifat penyelidikan kembali (*reinventing system*) terhadap usaha agribisnis yang ada melalui reformasi sistem, usaha, pelayanan publik, dan kelembagaan. Prinsip dasar berikutnya adalah renovasi dan revitalisasi teknologi dan kelembagaan. Melalui kedua prinsip dasar tersebut, diharapkan inovasi dapat diadopsi oleh masyarakat.

Pengenalan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani) merupakan salah satu skenario untuk menjawab tantangan di atas. Program ini dapat dipandang sebagai model atau konsep baru diseminasi teknologi dalam mempercepat penyampaian inovasi. Sekaligus program ini berfungsi sebagai jembatan penghubung langsung antara lembaga penghasil inovasi dengan lembaga penyampai (*delivery system*) dan pelaku agribisnis (*receiving system*) pengguna inovasi (Badan Litbang Pertanian, 2004a).

Pada intinya, pelaksanaan kegiatan Primatani adalah pengimplementasian secara terbatas (unit percontohan) inovasi teknis dan kelembagaan agribisnis di desa lokasi sasaran. Inovasi tersebut dapat dilakukan pada : (1) bidang komoditas yang meliputi aspek produksi, sarana produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil; (2) bidang pemanfaatan sumberdaya lahan dan air; (3) bidang pemanfaatan limbah dan air; dan (4) bidang konservasi tanah dan air (Badan Litbang Pertanian, 2004b).

Dari segi teknis, seluruh inovasi yang dilakukan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja teknologi yang dilaksanakan para praktisi agribisnis (terutama petani). Dari sisi kelembagaan, seluruh inovasi yang dilakukan diharapkan akan meningkatkan kinerja kelembagaan agribisnis yang selanjutnya berdampak pada peningkatan aksesibilitas petani terhadap pasar input dan output, permodalan dan teknologi unggul. Peningkatan kinerja kedua aspek teknis dan kelembagaan agribisnis tersebut berikutnya diharapkan akan berdampak positif pada kinerja hasil usahatani yang dicapai, khususnya petani dan umumnya bagi kehidupan masyarakat desa berupa peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan.

Analisis

Kebijakan pengembangan agribisnis kakao di lokasi kasus dilihat dari beberapa aspek yang berhubungan dengan : (1) potensi, kendala, dan peluang pengembangan; (2) analisis strategi pengembangan; dan (3) langkah operasional kebijakan pengembangan. Potensi, kendala, dan peluang pengembangan diidentifikasi dan dianalisis menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses,*

Opportunity, dan *Threat*). Analisis SWOT diawali dengan mengidentifikasi lokasi kasus dari sisi aspek kekuatan (*stength*) dan kelemahan (*weaknesses*) untuk faktor internal, serta peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) untuk faktor eksternal (Sianipar dan Entang, 2001 dalam Manikmas, 2003). Obyektifitas penilaian setiap aspek menggunakan skor 1 sampai 5, dimana skor 5 (dukungan sangat besar), skor 4 (dukungan besar), 3 (dukungan cukup), skor 2 (dukungan kurang), dan skor 1 (dukungan sangat kurang).

Selanjutnya, analisis strategi pengembangan didekati melalui matrik pemahaman aspek, pokok masalah, sumber masalah, akar masalah, kebutuhan inovasi, dan sumber teknologi. Sementara itu, langkah operasional kebijakan pengembangan dilakukan dalam kerangka analisis kelembagaan dengan fokus peran Primatani.

POTENSI, KENDALA, DAN PELUANG PENGEMBANGAN

Identifikasi Faktor Internal

Identifikasi faktor internal mencakup : (1) ketersediaan tenaga kerja keluarga; (2) penguasaan lahan usaha; (3) penguasaan modal usaha; (4) produksi; (5) pemasaran; (6) kelembagaan sosial; dan (7) kelembagaan ekonomi. Dari hasil identifikasi diperoleh gambaran bahwa nilai skor aspek kekuatan (*strength*) sedikit lebih tinggi dari pada nilai skor aspek kelemahan (*weaknesses*), yaitu masing-masing 3,4 (kekuatan) dan 3,3 (kelemahan). Artinya, terdapat potensi dukungan kekuatan internal yang cukup besar bagi wilayah setempat untuk pengembangan agribisnis kakao.

Usahatani kakao dapat dikatakan sebagai sumber mata pencaharian utama penduduk di lokasi kasus. Oleh karena itu, curahan waktu kerja dan alokasi tenaga kerja anggota rumah tangga petani setempat lebih banyak untuk kegiatan pekerjaan usahatani ini. Sebagai gambaran, rataan proporsi penggunaan tenaga kerja dalam keluarga adalah sekitar 60,23 persen dari total tenaga kerja yang diperlukan untuk pengelolaan usahatani kakao. Namun untuk skala usaha yang lebih luas, penggunaan tenaga kerja luar keluarga cenderung makin besar karena adanya keterbatasan jumlah ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga.

Lahan usahatani kakao relatif cukup luas, yaitu rata-rata lebih dari 0,5 hektar per kepala keluarga. Dengan rataan luas tersebut, maka cukup beralasan bagi rumah tangga petani setempat untuk menjadikan usahatani kakao sebagai sumber utama mata pencaharian keluarga. Akan tetapi ekstensifikasi dalam bentuk ekspansi penguasaan lahan, terutama keluar desa baik yang dibeli maupun yang disewa atau menerima gadai, sedikit banyaknya dikhawatirkan dapat mempengaruhi tingkat pengelolaan usahatani yang bersangkutan secara keseluruhan.

Selama ini para petani di lokasi kasus terbukti mampu membiayai usahatani kakao mereka secara swadana, kendati kategori pembiayaannya kebanyakan bersifat asal secukupnya menurut kemampuan masing-masing petani. Dengan kata lain petani setempat boleh dikatakan memiliki keterbatasan dalam modal usahatani, sehingga upaya penerapan teknologi juga terbatas.

Rataan produktivitas usahatani kakao di lokasi kasus relatif cukup tinggi, yaitu sekitar 1.350 kilogram per hektar per tahun. Rataan produktivitas ini sebetulnya masih di bawah produktivitas optimal usahatani kakao setempat, yakni antara 1.500 kilogram hingga 1.700 kilogram per hektar per tahun. Sementara itu kualitas produksi masih tergolong rendah, karena belum ditangani secara maksimal (khususnya dalam pascapanen).

Dalam penjualan hasil kakao, para petani di lokasi kasus memiliki akses langsung ke pedagang (pengumpul). Sebagian besar dari mereka dapat menjual hasil panen kakao secara bebas (tanpa ikatan) dengan pedagang. Beberapa petani di antaranya melakukan penjualan kepada pedagang langganan mereka, dan sebagian lagi karena terikat pinjaman dengan pedagang yang bersangkutan. Terlepas dari hal tersebut, petani setempat tidak banyak punya pilihan dalam pemasaran, kecuali ke pedagang pengumpul tersebut.

Di lingkungan masyarakat setempat (khususnya suku Bugis), ada satu tradisi dalam hal kegotongroyongan usahatani yang disebut '*makaleleng*'. Tradisi ini sebetulnya merupakan salah satu kekuatan untuk saling membantu dan meringankan pekerjaan (*sambat-sinambat*) sesama petani. Akan tetapi fenomenanya akhir-akhir ini mengalami degradasi, terutama sejak adanya kenaikan (*booming*) harga kakao pada waktu krisis moneter sekitar tahun 1997-1998 yang lalu.

Sarana dan prasarana produksi dengan kapasitas terbatas cukup tersedia di lokasi kasus. Akan tetapi, sarana dan prasarana produksi yang lengkap berada di luar desa (pusat kecamatan). Kelompok tani yang salah satu perannya diharapkan dapat membantu penyediaan keperluan petani, justru tidak berfungsi. Hal demikian disebabkan oleh tidak aktifnya organisasi ini di lokasi setempat.

Identifikasi Faktor Eksternal

Identifikasi faktor eksternal meliputi : (1) kependudukan; (2) kondisi sarana dan prasarana; (3) kondisi ekonomi; (4) akses ke sumber modal; (5) posisi tawar petani; (6) introduksi teknologi; (7) pembinaan oleh petugas; (8) perusahaan mitra; (9) kebijakan otonomi daerah; dan (10) liberalisasi ekonomi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa nilai skor untuk aspek peluang (*opportunity*) lebih tinggi dari pada faktor eksternal ancaman (*threat*), yaitu masing-masing 3,6 (peluang) dan 3,2 (ancaman). Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa wilayah setempat memiliki potensi dukungan peluang relatif besar dalam pengembangan agribisnis kakao dibandingkan faktor ancaman.

Salah satu faktor yang berkaitan erat dengan kependudukan adalah sumberdaya manusia. Terkait dengan itu, sumberdaya manusia (petani) di lokasi kasus boleh dikatakan memiliki banyak pengalaman dalam pengelolaan usahatani kakao. Jenis tanaman ini sudah mereka budidayakan sejak belasan atau bahkan ada yang sudah diatas dua puluh tahun yang lalu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sumberdaya manusia yang berpengalaman dalam usahatani kakao cukup banyak ditemui di lokasi kasus. Akan tetapi, para tenaga muda usia cenderung kurang berminat terjun dalam bidang pertanian. Mereka relatif lebih tertarik bekerja di sektor nonpertanian.

Kondisi sarana dan prasarana (khususnya transportasi) di lokasi kasus relatif memadai. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebagian kondisi jalan tersebut berikut jembatannya ada yang kurang baik, terutama sulit dilalui pada waktu banjir.

Usahatani kakao adalah sumber utama ekonomi rumah tangga di lokasi kasus. Oleh karena itu, ketidakstabilan harga akan berdampak langsung, khususnya terhadap pendapatan petani. Hal negatif paling serius adalah jika terjadi penurunan harga secara drastis, dimana dampaknya dapat menurunkan pendapatan petani dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan usahatani kakao.

Eksistensi sumber modal misalnya bank dan lembaga sejenis lainnya seperti pedagang dan pelepas uang cukup eksis di lokasi kasus. Paling tidak bank seperti BRI Unit Desa ada di tingkat kecamatan, sedangkan pedagang dan pelepas uang terdapat di desa. Namun kurangnya informasi dan pengetahuan para petani serta sulitnya memenuhi persyaratan pinjaman modal dari bank, menyebabkan akses mereka terhadap lembaga ini jadi terbatas. Sementara itu sumber modal seperti pedagang apalagi pelepas uang cenderung lebih mengikat dan menyulitkan petani.

Sebagian besar petani di lokasi kasus relatif bebas memilih pedagang (pengumpul) yang menurut mereka menawarkan harga tertinggi. Namun dibalik itu posisi tawar mereka lemah karena harga secara dominan ditetapkan oleh pedagang.

Eksistensi Primatani dalam menjembatani diseminasi teknologi dipandang strategis karena visi dari program ini adalah sebagai penghubung langsung antara lembaga penghasil inovasi (Badan Litbang Pertanian) dengan lembaga penyampai (*delivery system*) maupun pelaku agribisnis (*receiving system*) pengguna inovasi. Dengan kata lain program ini merupakan salah satu upaya dalam memperkenalkan dan memasyarakatkan hasil inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat pengguna dalam rangka memacu adopsi di tingkat petani. Namun dibalik itu ada suatu kekhawatiran logis apabila kegiatan tidak berlanjut setelah program selesai, karena selama ini banyak terjadi kasus program berhenti seiring berakhirnya kegiatan.

Petugas penyuluh seperti PPL dapat dianggap sebagai salah satu media bagi para petani di lokasi kasus untuk mendapatkan informasi dan sekaligus bimbingan dalam menjalankan kegiatan usahatani mereka. Akan tetapi selama ini petugas yang dimaksud relatif jarang memberikan bimbingan, sehingga fungsi pembinaannya boleh dikatakan belum optimal.

Di lokasi kasus ada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Prima Kakao yang sudah berpengalaman dalam pembinaan/pemberdayaan petani kakao. Lembaga ini memiliki akses langsung dengan eksportir (PT Effem Indonesia) di Makassar. Secara parsial lembaga ini sudah mulai terlibat dalam kerjasama kegiatan pembinaan/pemberdayaan petani melalui Primatani di lokasi studi. Tapi kerjasama tersebut seyogyanya diformalkan dalam bentuk nota kesepakatan agar ada tanggungjawab di masing-masing pihak, paling tidak antar pelaksana Primatani (BPTP Sulse), petani (kelompok), dan LSM.

Salah satu di antara aspek kebijakan otonomi daerah adalah adanya otoritas pemerintahan lokal (kabupaten) mengelola potensi sumberdaya wilayah setempat. Kondisi ini merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan usahatani kakao sebagai komoditas unggulan di daerah yang bersangkutan. Meski demikian, perlu adanya komitmen, aturan atau kebijakan yang mendukung upaya ke arah itu agar kegiatannya dapat berjalan optimal.

Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang secara langsung bersentuhan dengan perdagangan internasional yang sifatnya kompetitif. Pada umumnya kakao dari Sulawesi Selatan memiliki keunggulan spesifik, yaitu kandungan lemaknya tidak mencair bila disimpan pada suhu kamar. Akan tetapi keterbatasan teknologi yang dimiliki petani dapat menyebabkan kalah bersaingnya komoditas ini dalam liberalisasi (globalisasi) ekonomi.

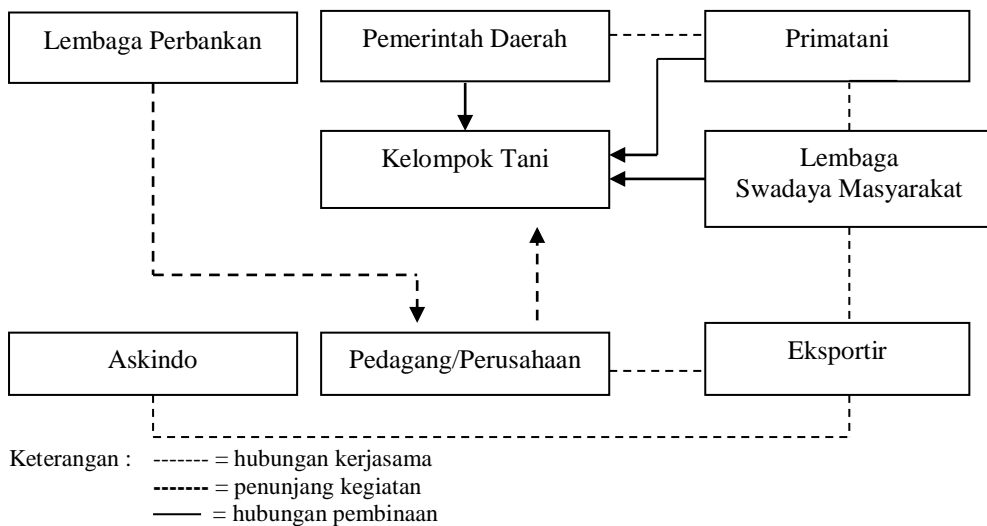
ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN

Permasalahan agribisnis kakao di lokasi kasus dapat dikelompokkan menjadi enam aspek, yakni : (1) produksi; (2) diversifikasi; (3) pascapanen; (4) pemanfaatan limbah; (5) sarana dan prasarana; dan (6) kelembagaan. Hasil kajian BPTP Sulawesi Selatan (Sahardi *et al.*, 2005) menunjukkan bahwa secara garis besar pokok permasalahan agribisnis kakao di lokasi kasus adalah : (1) produksi : kuantitas dan kualitas produksi kakao mengalami penurunan sekitar 30-40 persen (dari 1.500-1.700 kg/ha menjadi 900-1.200 kg/ha); (2) diversifikasi : petani tidak atau kurang memperhatikan jenis komoditas lain seperti kelapa, pisang, ternak, dan sebagainya; (3) pascapanen : mutu kakao rendah (kadar air sekitar 30-35%), sehingga harganya juga rendah; (4) pemanfaatan limbah : limbah kakao belum dimanfaatkan secara optimal untuk pupuk dan pakan ternak; (5) sarana dan prasarana : transportasi sarana produksi dan hasil terganggu atau kurang lancar (terutama di musim hujan); dan (6) kelembagaan : kelompok tani belum berfungsi optimal, penyalur sarana produksi yang lengkap berada di luar desa, dan keberadaan lembaga penyedia modal terbatas.

Secara garis besar, inovasi yang dibutuhkan sebagai alternatif pengembangan agribisnis kakao di lokasi kasus terkait dengan beberapa aspek, yaitu: (1) Produksi: kebutuhan inovasi meliputi Sekolah Lapang Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (SLPHT), teknik peremajaan tanaman, penyediaan sumber entris, analisis rekomendasi pemupukan, dan perbaikan sistem drainase; (2) Diversifikasi: inovasi yang dibutuhkan mencakup teknik dan sistem integrasi tanaman dan ternak (*crops livestock system*), serta introduksi bibit unggul tanaman potensial lainnya seperti kelapa dan vanili; (3) Pascapanen: dalam kegiatan ini diperlukan inovasi seperti perbaikan teknologi pascapanen untuk pengeringan dan sortasi serta teknologi pengolahan; (4) Pemanfaatan Limbah: terkait dengan hal ini inovasi yang diperlukan adalah teknologi pengolahan limbah untuk pupuk dan pakan; (5) Sarana dan Prasarana: program pembangunan jalan usahatani, jalan poros desa, dan jembatan merupakan salah satu prasyarat utama untuk menunjang percepatan inovasi; dan (6) Kelembagaan: aspek ini memerlukan inovasi yang terkait dengan pembinaan kelompok yang berkelanjutan, pola kemitraan, dan penguatan lembaga pemasaran petani (Tabel 1).

LANGKAH OPERASIONAL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

Langkah operasional kebijakan pengembangan agribisnis kakao di lokasi kasus adalah dengan melibatkan secara aktif partisipasi beberapa pihak (*stakeholders*) seperti kelompok tani sebagai sentral atau fokus kegiatan: Primatani sebagai program inti, serta pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga lainnya sebagai unsur penunjang. Mekanismenya diilustrasikan pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Mekanisme Pengembangan Agribisnis Kakao di Lokasi Kasus

Primatani

Primatani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian) merupakan suatu model pengembangan agribisnis terpadu antara penelitian, penyuluhan, agribisnis, dan pelayanan pendukung yang berbasis inovasi teknologi dalam suatu kawasan 'laboratorium agribisnis'. Prinsip yang digunakan adalah '*build, operate, dan transfer (BOT)*' yang mengandung arti bahwa model inovasi yang diperkenalkan dan dimasyarakatkan merupakan sesuatu yang baru, sifatnya masih introduksi awal untuk selanjutnya diestafetkan kepada institusi teknis yang melaksanakan program pengembangan dalam skala luas (massal). Tujuannya adalah untuk membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis inovasi teknologi yang memadukan sistem inovasi dengan kelembagaan agribisnis (Badan Litbang Pertanian, 2004a).

Implementasi Primatani di lokasi kasus telah dilalui dengan tahapan : (1) perencanaan (penentuan lokasi, survei pendasaran, *participatory rural appraisal*, dan desain laboratorium agribisnis); dan (2) sosialisasi kegiatan. Tahap berikutnya akan diikuti dengan kegiatan : (1) implementasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka pembentukan laboratorium agribisnis, unit industri agribisnis, dan sistem usahatani intensifikasi-diversifikasi; (2) supervisi, monitoring, dan evaluasi; (3) pengorganisasian; (4) koordinasi; (5) pembinaan; dan (6) pemassalan.

Kunci strategis peran Primatani dalam implementasi kegiatannya bertumpu pada jaringan kerjasama baik secara internal maupun eksternal antar *stakeholders*. Jaringan kerjasama internal difungsikan dalam rangka mewujudkan kerjasama sinergis antara Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian dalam pembentukan/pembangunan laboratorium agribisnis. Sementara itu, jaringan kerjasama eksternal diarahkan untuk mewujudkan kerjasama sinergis antara jaringan Badan Litbang Pertanian dengan Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan masyarakat setempat.

Sesuai dengan prinsip dasar Primatani sebagaimana dikemukakan di atas, setelah model laboratorium lapang agribisnis dipandang sudah mampu mandiri, maka pematangan model berikutnya diserahkan kepada kelompok tani dalam bentuk Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT). Selama masa transisi, pembinaan tetap dilakukan oleh tim teknis sampai laboratorium agribisnis menjadi model percontohan yang siap diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut baik oleh petani atau pelaku agribisnis secara swadana maupun oleh pemerintah daerah sebagai program massal.

Kelompok Tani

Pada hakekatnya kelompok tani adalah organisasi yang memiliki fungsi sebagai media musyawarah petani. Di samping itu, organisasi ini juga memiliki peran dalam akselerasi kegiatan program pembangunan pertanian. Namun banyak

kasus ditemui bahwa kelompok tani dibentuk dalam kaitannya dengan implementasi program. Akibatnya, eksistensi kelompok tani yang demikian itu sering berakhir seiring selesainya kegiatan program. Akibat lebih luas, manfaat program hanya dirasakan pada saat implementasi tanpa keberlanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, eksistensi kelompok tani harus dilandasi oleh prinsip partisipatif. Dengan kata lain kelompok tani dibentuk oleh petani sendiri, sementara pihak luar hanya berperan sebagai fasilitator. Hal yang perlu digarisbawahi adalah perlu adanya pembekalan kelompok tani yang sekaligus difasilitasi oleh fasilitator. Materi pembekalan yang perlu disiapkan adalah yang berkaitan dengan pemberdayaan seperti fungsi, tugas, perencanaan, pengawasan, dan lain-lain, sehingga kelompok tani dapat tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mandiri (*empowered*). Hendaknya pembekalan ini tidak hanya difasilitasi oleh fasilitator atau tim pakar saja, tetapi juga dengan mengundang pihak-pihak lain (*stakeholders*) dari unsur penunjang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Sekaligus kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu ajang pertemuan untuk saling berintegrasi antar semua pihak guna mengembangkan agribisnis kakao.

Pemerintah Daerah

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pihak pemerintah setempat memiliki peran yang lebih besar dalam memajukan daerahnya. Oleh karena itu, pengembangan agribisnis kakao merupakan salah satu peluang untuk memajukan daerah setempat. Instansi-instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, atau DPRD setempat dapat dianggap sebagai lembaga yang semestinya bisa berpartisipasi dalam implementasi langkah operasional pengembangan agribisnis kakao ini.

Lembaga Perbankan

Sektor perbankan selama ini telah terbukti sebagai salah satu pilar dalam menyokong pembangunan ekonomi. Namun keterlibatan sektor terkait dalam bidang pertanian relatif terbatas pada kegiatan skala usaha besar, antara lain untuk eksportir atau perkebunan besar. Peran lembaga perbankan untuk skala usaha kecil seperti petani di pedesaan boleh dikatakan langka. Paling menonjol hanya sebatas bantuan penyaluran kredit usahatani seperti yang pernah dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bantuan kredit permodalan banyak ditemui pada pengusaha nonpertanian dan jarang sekali untuk petani, yang sebetulnya juga dapat dikategorikan sebagai pengusaha pertanian. Padahal selama ini petani diketahui sebagai pihak yang selalu lemah dalam permodalan dan proses transaksi pemasaran.

Fenomena diatas lazim terjadi mengingat perbankan sendiri adalah lembaga profit yang sudah barang tentu tidak mau menanggung risiko kerugian. Selama ini salah satu faktor kelemahan petani adalah tidak adanya kepastian (*uncertainty*) terhadap hasil usahatani yang tidak bisa disimpan lama (*perishable*). Di samping itu petani sendiri cenderung bertindak sendiri-sendiri atau minimal hanya melakukan kegiatan kolektif secara nonformal dan terbatas.

Satu peluang yang perlu ditindaklanjuti di lokasi kasus saat ini adalah kerjasama dengan PT Bank Muamalat. Diskusi awal dengan pihak Bank tersebut mengisyaratkan bahwa lembaga terkait membuka kesempatan untuk diajak berpartisipasi dalam langkah operasional pengembangan agribisnis kakao. Hal tersebut sesuai dengan salah satu skim yang dimiliki PT Bank Muamalat sendiri, yaitu skim mikro yang ditujukan untuk unit kegiatan skala kecil di akar rumput (*grass root*). Bentuk pembiayaannya dapat dalam kategori bagi hasil atau jual beli komoditas. Kategori pertama didasari atas kelayakan usaha, sementara kategori kedua berlandaskan kesepakatan harga (*fixed price*).

Peluang di atas seyogyanya dapat direalisasikan sejalan dengan rencana PT Bank Muamalat sendiri yang dalam waktu dekat akan membuka cabang di Kota Palopo (ibukota Kabupaten Luwu). Namun di atas semua itu, perlu dicatat bahwa selama ini pihak perbankan banyak yang menilai petani sebagai pihak yang masih diragukan karakter dan kapabilitasnya dalam memenuhi persyaratan perbankan. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah melalui jalinan kerjasama dengan pihak tertentu (pedagang/perusahaan) yang membeli produk kakao dari kelompok tani dan sekaligus bertindak sebagai *avalis* (penjamin kredit) di bank.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Salah satu LSM yang berpengalaman dalam hal pemberdayaan masyarakat, khususnya di lokasi kasus, adalah Prima Kakao. Lembaga ini sekaligus juga punya akses langsung (berafiliasi) dengan salah satu eksportir kakao, yaitu PT Effem Indonesia. Saat ini Prima Kakao bersama dengan BPTP Sulawesi Selatan sudah berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan petani di lokasi Primatani. Di samping lembaga tersebut berperan dalam bantuan bimbingan teknis di lapang, sekaligus diharapkan juga perannya dalam mempromosikan wilayah setempat kepada pihak eksportir, khususnya ke PT Effem Indonesia.

Eksportir

Dilihat dari sisi perdagangan, satu di antara perusahaan eksportir yang eksis di lokasi kasus adalah PT Effem Indonesia. Eksportir ini berkedudukan di Makassar dan sekaligus memiliki hubungan langsung dengan pihak Prima Kakao. Oleh karena itu, peran perusahaan yang bersangkutan diharapkan bisa berintegrasi dalam langkah operasional pengembangan agribisnis kakao.

Pedagang/Perusahaan

Selama ini banyak tudingan yang diarahkan kepada para pedagang sebagai pihak yang sering mengambil keuntungan besar dari pembelian komoditas pertanian dibandingkan tingkat keuntungan yang diperoleh petani sebagai produsen. Tingkat dan harga lebih dominan ditentukan mereka, sehingga posisi tawar menawar petani acapkali jadi lemah. Oleh karena itu, peran serta pedagang dalam langkah operasional pengembangan agribisnis kakao ini perlu diupayakan. Salah satu bentuk konkritnya adalah dengan mengajak pedagang (perusahaan) tertentu dalam kegiatan terkait dan sekaligus diharapkan berperan sebagai *avalis* untuk petani setempat. Unsur penyokongnya dapat diperkuat dengan melibatkan pihak Dinas Perdagangan dan Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) di dalamnya.

Askindo

Askindo adalah wadah yang memayungi para eksportir dalam aktivitas mereka. Lembaga tersebut cenderung lebih banyak bersentuhan dengan perusahaan-perusahaan besar (eksportir). Kendati Askindo berhubungan secara tidak langsung dengan petani melalui perpanjangan tangan perusahaan (pedagang) di bawahnya, kebanyakan petani tidak mengetahui persis eksistensi lembaga ini. Oleh karena itu, partisipasi lembaga terkait dalam operasionalisasi pengembangan agribisnis kakao di wilayah setempat dapat dipandang sebagai satu langkah strategis.

PENUTUP

Langkah operasional kebijakan yang perlu diwujudkan dalam pengembangan agribisnis kakao di lokasi kasus adalah melalui perencanaan, implementasi, dan pengawasan partisipatif (*participatory*) yang bahu membahu (*integrative*), menyeluruh (*holistic*), dan lumintu (*sustainable*) dengan landasan nota kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) antar berbagai pihak (*stakeholders*).

Terkait dengan Primatani, secara konseptual eksistensi program ini tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, kekhawatiran akan adanya kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan (implementasi) kegiatan adalah suatu hal yang logis. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat, khususnya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan, semestinya berdedikasi penuh dalam kegiatan ini. Peran BPTP tentunya tidak hanya sebatas sebagai pelaksana teknis lapang, tetapi juga sekaligus berperan dalam mendekatkan (negosiator) dengan lembaga lain yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan agribisnis kakao setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Pertanian. 2004a. Rancangan Dasar Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani). Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian. Jakarta.
- Badan Litbang Pertanian. 2004b. *Baseline Survey* Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani). Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian. Jakarta.
- Baga, L.M. 2003. Peran Wirakoperasi dalam Pengembangan Sistem Agribisnis (Kajian terhadap Pengembangan Agribisnis Persusuan di Indonesia). Paper disampaikan pada Seminar Dwi Bulanan ISTECS Eropa, 5 Juli 2003. Pusat Studi Asia Tenggara, Universitas Frankfurt. Jerman.
- BPS Luwu. 2004. Kabupaten Luwu Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. Palopo.
- BPS Sulsel. 2004. Sulawesi Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Makassar.
- Dirjenbun. 2004. Statistik Perkebunan Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Manikmas, M.O.A., Suparyono, I.G. Ismail, P. Wardana, D.K.S. Swastika, D. Priyanto, B. Harjanto, A. Djajanegara, K. Kariyasa, dan D. Pasaribu. 2003. Kasus dan Sintesis Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Padi dan Ternak (P3T) ke Depan. Pusat Kasus dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
- Sahardi, M.Z. Kanro, D. Sahari, M.A. Bilang, H. Muhammad, H. Djuddawi, dan Kasman. 2005. Laporan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) Primatani di Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan. Makassar.
- Sunanto, H. 1992. Cokelat : Budidaya, Pengolahan Hasil, dan Aspek Ekonomisnya. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Tabel 1. Masalah, Sumber Masalah, Akar Masalah, Kebutuhan Inovasi, dan Sumber Teknologi Usahatani Kakao di Lokasi Kasus

Aspek	Pokok Masalah	Sumber Masalah	Akar Masalah	Kebutuhan Inovasi	Sumber Teknologi
1. Produksi	- Penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dimana secara spesifik kuantitas sekitar 30-40 persen (dari 1.500-1.700 kg/ha menjadi 900-1.200 kg/ha)	- HPT (busuk buah, PBK, dan kanker batang) - Umur tanaman tua - Pemupukan dan pengelolaan lahan belum optimal	- Teknik pengendalian HPT, sanitasi, dan penanganan limbah belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan petani - Petani tidak ada/belum tahu sistem penggantian (rehabilitasi) yang tepat - Entris unggul tidak tersedia di tempat yang dekat - Belum memakai teknik pemupukan yang tepat - Resiko banjir - Pupuk belum tersedia secara tepat	- SLPHT - Teknik peremajaan - Sumber entris - Analisis rekomendasi pemupukan dan perbaikan sistem drainase	- Puslit Koka, Balitklimat, dan BPTP
2. Diversifikasi	- Petani tidak/kurang memberi perhatian terhadap komoditas lain (kelapa, pisang, ternak, dsb.)	- Petani terfokus pada kakao karena produksinya lebih tinggi	- Pemahaman peluang peningkatan pendapatan dari tanaman/ternak lain masih terbatas	- Teknik dan sistem integrasi tanaman dan ternak (<i>crops livestock system</i>) - Bibit kelapa, vanili	- Puslit Koka, Balitka, Puslitbangun, Balitnak, dan BPTP
3. Pascapanen	- Mutu rendah (kadar air sekitar 30-35%) - Harga rendah	- Petani hanya berhubungan dengan pedagang pengumpul desa	- Teknologi pengeringan masih sederhana - Petani memerlukan uang tunai segera - Tidak melakukan fermentasi karena makan waktu dan tidak ada insentif harga	- Perbaikan teknologi pascapanen untuk pengeringan dan sortasi - Teknologi pengolahan	- BB Pascapanen, BB Alsintan, Puslit Koka, dan BPTP

Tabel 1. (lanjutan)

Aspek	Pokok Masalah	Sumber Masalah	Akar Masalah	Kebutuhan Inovasi	Sumber Teknologi
4. Pemanfaatan Limbah	- Limbah belum dimanfaatkan secara optimal untuk pupuk dan pakan ternak	- Keterbatasan pengetahuan	- Kurangnya informasi	- Teknologi pengolahan limbah untuk pupuk dan pakan	- BB Alsintan dan BPTP
5. Sarana dan prasarana	- Transportasi sarana produksi dan hasil terganggu/kurang lancar (terutama di musim hujan)	- Jalan (kerikil) dan jembatan (kayu) kurang baik - Jalan usahatani belum ada	- Tidak ada program dari kecamatan atau kabupaten seperti perbaikan jalan dan jembatan	- Pembangunan atau rehabilitasi jalan usahatani, jalan poros desa, dan jembatan	- Pemda Kabupaten, DPRD, dan BPTP
6. Kelembagaan	- Kelompok tani belum berfungsi optimal - Penyalur saprodi berada di luar desa - Keterbatasan lembaga penyedia modal	- Organisasi kelompok belum sempurna - Koperasi belum berfungsi optimal - Lembaga pemasaran belum terorganisir	- Organisasi dan manfaat kelompok belum difahami	- Pembinaan kelompok yang berkelanjutan - Pola kemitraan - Penguatan lembaga pemasaran petani	- Dinas Koperasi, Dinas Pertanian terkait, BPMD, dan BPTP

Sumber: Sahardi *et al.*, 2005 (dimodifikasi).